

Literatur Review: Akuntansi Sektor Publik dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara

Cintya Dwi Putri Supriyatna¹, Mealvin Febriani Sulistia², Yuniati³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

E-mail: cintyaaad@gmail.com¹, mealvinf@gmail.com², yuniati@umbandung.ac.id³

ABSTRACT

The management of state finances demands high standards of transparency and accountability to achieve good governance. This study aims to conduct a literature review on the role of public sector accounting in strengthening the transparency and accountability of state finances. Through an analysis of 20 journal articles, it was found that the application of public sector accounting systems, including the implementation of accrual-based accounting and the Central Government Accounting System (SAPP), contributes significantly to improving the quality of financial reports and the performance of government agencies. Public sector accounting serves as a strategic tool to provide open fiscal information and minimize opportunistic behavior as well as the risk of fraud. Furthermore, the integration of digital technology and the strengthening of internal controls are crucial factors in facing the challenges of accounting evolution in the modern era. The results of this review confirm that transparency and accountability are the main pillars in state financial management that cannot be separated to achieve public welfare.

Keywords: *Public Sector Accounting, Transparency, Accountability, State Finance, Financial Statements.*

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan negara menuntut standar transparansi dan akuntabilitas yang tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan literatur mengenai peran akuntansi sektor publik dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Melalui analisis terhadap 20 artikel jurnal, ditemukan bahwa penerapan sistem akuntansi sektor publik, termasuk implementasi akuntansi berbasis akrual dan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Akuntansi sektor publik berfungsi sebagai alat strategis untuk menyediakan informasi fiskal yang terbuka dan meminimalkan perilaku oportunistik serta risiko kecurangan (*fraud*). Selain itu, integrasi teknologi digital dan penguatan pengendalian internal menjadi faktor krusial dalam menghadapi tantangan evolusi akuntansi di era modern. Hasil tinjauan ini menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam pengelolaan keuangan negara yang tidak dapat dipisahkan untuk mencapai kesejahteraan publik.

Kata Kunci: Akuntansi Sektor Publik, Transparansi, Akuntabilitas, Keuangan Negara, Laporan Keuangan.

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan modern, akuntansi pemerintah memainkan peran penting sebagai alat utama untuk mencapai kinerja pemerintah yang maksimal dan memastikan pengelolaan uang negara yang terbuka. Permintaan masyarakat akan pemerintah yang bersih mendorong kebutuhan akan sistem administrasi yang dapat meningkatkan kinerja dan tanggung jawab publik (Cinta & Tjandrakirana, 2025). Secara umum, akuntansi Sektor Publik di Indonesia telah berkembang pesat dengan penekanan utama pada peningkatan keterbukaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah di semua tingkatan (Hendriarto et al., 2025). Ini sesuai dengan prinsip bahwa pengelolaan dana negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui laporan yang teratur dan jelas (Windy & Subardjo, 2023).

Penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting di level pemerintah daerah, di mana mutu laporan keuangan menjadi ukuran keberhasilan kerja birokrasi. Kinerja pemerintah daerah sangat tergantung pada seberapa baik pertanggungjawaban dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan diterapkan di setiap bagian operasionalnya (Edowati et al., 2021; Sarius et al., 2025). Selain itu, penerapan akuntansi pemerintah yang benar di daerah diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang berlaku (Saputra et al., 2025). Untuk menjamin hal ini, pengawasan terhadap mutu laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dalam menciptakan pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang dapat dipercaya (Rupilu et al., 2024). Keterbukaan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga terbukti sebagai faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah (Zega et al., 2025).

Di sisi lain, mutu anggaran pemerintah menjadi penentu utama dalam kinerja keuangan negara secara keseluruhan (Akbar et al., 2025). Pemerintah pusat telah berusaha meningkatkan efisiensi ini melalui penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) untuk memperkuat keterbukaan (Maharani et al., 2025). Selain itu, inovasi dalam tata kelola dilakukan dengan mengintegrasikan sistem pengadaan dan pembayaran yang bertindak sebagai pendorong efisiensi keuangan negara (Sabdono et al., 2025). Dalam pandangan jangka panjang, akuntansi publik juga memiliki peran strategis dalam menjaga kelangsungan fiskal melalui keterbukaan informasi tata kelola (Siahay, 2023).

Tantangan dalam mencapai tata kelola yang baik masih ada, terutama terkait risiko penipuan dan perilaku oportunistik di lingkungan pemerintah (Yuanita, 2021). Oleh karena itu, penerapan akuntansi berbasis akrual yang didukung oleh sistem pengendalian internal yang kuat sangat diperlukan untuk menjaga pertanggungjawaban kinerja lembaga (Aprilia & Ramadhan, 2025). Pengendalian internal yang efektif, dikombinasikan dengan tata kelola pemerintah yang baik, terbukti memengaruhi mutu laporan keuangan sektor publik (Kewo & Tanor, 2020). Lebih spesifik, penilaian efektivitas pengendalian internal menjadi pertahanan utama dalam mencegah penipuan akuntansi (Matondang et al., 2025). Hal ini didukung oleh temuan bahwa penerapan akuntansi pemerintah yang ketat dapat mengurangi risiko kecurangan (Khairan et al., 2023).

Cakupan pertanggungjawaban ini tidak hanya mencakup lembaga pemerintah besar, tetapi juga meluas ke unit-unit pengelola dana yang lebih kecil namun langsung memengaruhi masyarakat. Contohnya, keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana sekolah menjadi fokus penting di bidang pendidikan (Wahidin & Susilawati, 2020). Begitu pula di tingkat desa, analisis pelaporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menunjukkan kebutuhan akan standar keterbukaan yang cukup (Ana & Ga, 2021). Saat ini, di era digital, teori akuntansi

pemerintah terus berkembang untuk menghadapi tantangan baru dalam menjaga relevansinya (Rajagukguk et al., 2025).

B. KAJIAN LITERATUR

Transparansi Keuangan Negara

Transparansi merujuk pada prinsip terbuka yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses dan memahami informasi secara menyeluruh terkait keuangan negara. Penerapan sistem seperti Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) berperan sebagai fondasi utama untuk mendorong transparansi informasi keuangan (Maharani et al., 2025). Efisiensi transparansi juga didorong melalui integrasi sistem pengadaan dan pembayaran yang meminimalisir sekat-sekat informasi (Sabdono et al., 2025). Keterbukaan informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan pertanggungjawaban di hadapan masyarakat (Zega et al., 2025; Siahay, 2023).

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan melaporkan segala aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik. Akuntabilitas hierarkinya harus diterapkan secara menyeluruh, mulai dari tingkat pusat hingga pengelolaan dana di tingkat sekolah (Wahidin & Susilawati, 2020) dan Badan Usaha Milik Desa/BUMDes (Ana & Ga, 2021). Terdapat korelasi positif antara tingkat akuntabilitas dengan kinerja keuangan negara dan daerah. Pemerintah yang akuntabel cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih sehat dan terukur (Akbar et al., 2025; Sarius et al., 2025).

Sistem Pengendalian Internal dan Pencegahan Kecurangan

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan mekanisme yang terintegrasi dalam berbagai langkah dan aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memberikan jaminan yang cukup terhadap pencapaian tujuan organisasi. Penguatan akuntabilitas kinerja sangat bergantung pada implementasi akuntansi berbasis akrual yang didukung oleh SPI yang kuat (Aprilia & Ramadhan, 2025). SPI berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan (fraud) dalam akuntansi sektor publik (Khairan et al., 2023). Evaluasi efektivitas SPI yang dilakukan secara rutin dapat meminimalkan perilaku oportunistik birokrasi dan melindungi aset negara (Matondang et al., 2025; Yuanita, 2021).

Good Government Governance (GGG)

Tata kelola pemerintah yang efektif (*Good Government Governance*) melibatkan praktik penyerahan kewenangan dan pengaturan sumber daya guna mewujudkan sasaran pembangunan. Penerapan prinsip GGG yang dikombinasikan dengan sistem pengendalian internal yang kuat akan menghasilkan laporan keuangan di sektor publik yang memiliki kualitas tinggi dan integritas (Kewo & Tanor, 2020). Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah juga sangat ditentukan oleh efektivitas pengawasan terhadap mutu laporan keuangan yang diproduksi (Rupilu et al., 2024).

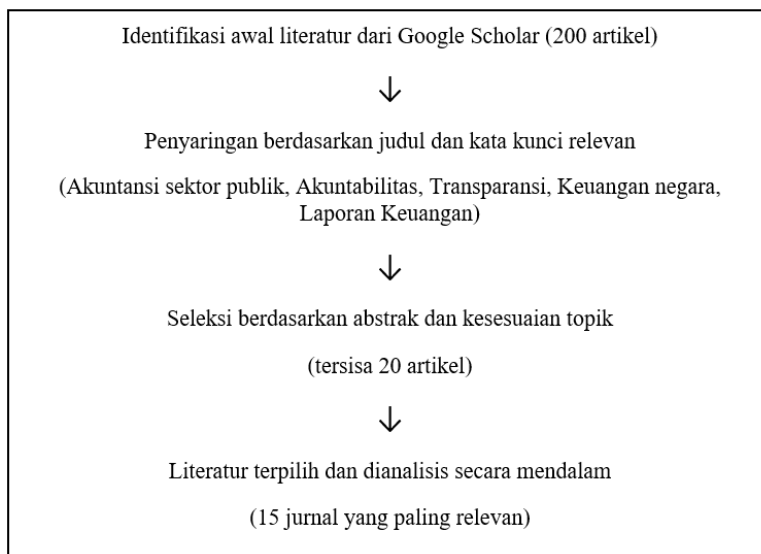
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan teori di atas, dapat dirumuskan bahwa akuntansi sektor publik (melalui instrumen seperti akuntansi pemerintahan, basis akrual, dan SAPP) berfungsi sebagai pondasi. Pondasi ini, jika didukung oleh sistem pengendalian internal yang efektif, akan menghasilkan transparansi informasi. Transparansi inilah yang pada akhirnya mewujudkan akuntabilitas negara, mencegah kecurangan, dan meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan (Cinta & Tjandrakirana, 2025; Saputra et al., 2025; Windy & Subardjo, 2023).

C. PELAKSANAAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) untuk menganalisis dan mensintesis teori serta hasil penelitian terdahulu mengenai peran akuntansi sektor publik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari delapan jurnal ilmiah terbitan lima tahun terakhir, serta didukung oleh buku dan publikasi akademik yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu menelusuri, menyeleksi, mengkaji, dan mencatat informasi dari berbagai sumber berdasarkan kesesuaian topik, kredibilitas, dan relevansinya dengan tujuan penelitian.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui proses identifikasi, perbandingan, dan sintesis berbagai teori serta temuan penelitian sebelumnya. Hasil analisis kemudian disajikan secara naratif untuk menjelaskan peran akuntansi sektor publik dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan negara yang baik. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder tanpa pengumpulan data primer, sehingga hasil kajian bergantung pada kualitas dan relevansi literatur yang digunakan. Selain itu, perbedaan konteks penelitian pada setiap sumber serta keterbatasan akses terhadap beberapa publikasi terbaru dapat memengaruhi keluasan pembahasan, meskipun tidak mengurangi tujuan penelitian dalam memberikan pemahaman konseptual mengenai peran akuntansi sektor publik.



Gambar 1. Tahapan Penyaringan Jurnal Literatur

Tabel 1. Ikhtisar Kajian Sebelumnya

No	Penulis dan Tahun	Judul Artikel	Hasil Penelitian
1	Akbar, D. F., et al. (2025)	Dampak Kualitas Anggaran Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Keuangan Negara Indonesia	Kualitas anggaran dan akuntabilitas publik berdampak positif terhadap peningkatan kinerja keuangan negara secara makro.
2	Ana, A. T. R., & Ga, L. L. (2021)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Bumdes	Penerapan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan sangat krusial dalam tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
3	Aprilia, G. D., & Ramadhan, P. R. (2025)	Pengaruh Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Manajemen Aset Negara	Penerapan basis akruaI dan pengendalian internal yang kuat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.
4	Cinta, D. C. S., & Tjandrakirana, R. (2025)	Analisis Kebijakan Adopsi Ipsas Sebagai Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Administrasi Keuangan Negara Dalam Mencapai Kinerja Dan Akuntabilitas Publik Yang Lebih baik : Kajian Literatur Sistematis	Akuntansi pemerintahan berperan vital dalam administrasi keuangan negara untuk mencapai kinerja dan akuntabilitas publik yang lebih baik.
5	Edowati, M., et al. (2021)	Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai	Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan mendukung visi BPK dan berpengaruh pada kinerja Pemda.
6	Hendriarto, P., et al. (2025)	Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia: Kajian Sistematis Atas Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah	Fokus utama akuntansi sektor publik saat ini adalah penguatan aspek transparansi dan akuntabilitas pasca reformasi birokrasi.
7	Kewo, C. L., & Tanor, L. A. O. (2020)	Apakah Good Government Governance Dan Pengendalian Intern Dapat Mempengaruhi Kualitas Akuntabilitas Laporan Keuangan Sektor Publik?	Good Government Governance dan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas akuntabilitas laporan keuangan.
8	Khairan, U., et al. (2023)	Dampak Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud	Penerapan akuntansi sektor publik dan akuntabilitas kinerja terbukti efektif dalam mencegah kecurangan (fraud) dan kerugian negara.
9	Maharani, A. P., et al. (2025)	Evaluasi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Sapp) Dalam Meningkatkan	Implementasi SAPP secara optimal mendukung transparansi dan mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel.

No	Penulis dan Tahun	Judul Artikel	Hasil Penelitian
10	Matondang, K. A., et al. (2025)	Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Negara Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal Dalam Mencegah Kecurangan Akuntansi Sektor Publik	Pengendalian internal yang efektif, didukung teknologi pengawasan, mampu mencegah kecurangan akuntansi.
11	Rajagukguk, G. P. J., et al. (2025)	Evolusi Teori Akuntansi Sektor Publik: Analisis Perkembangan Dan Tantangan Di Era Digital	Teori akuntansi sektor publik berevolusi di era digital untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi laporan keuangan.
12	Rupilu, M., et al. (2024)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
13	Sabdono, W. A., et al. (2025)	Sebagai Katalisator Integrasi Pengadaan Dan Pembayaran Untuk Mendorong Efisiensi Dan Transparansi Tata Kelola Keuangan Negara	Integrasi sistem pengadaan dan pembayaran berfungsi sebagai katalisator untuk efisiensi dan transparansi tata kelola keuangan negara.
14	Saputra, Y. M., et al. (2025)	Analisa Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa	Perlakuan akuntansi sektor publik di daerah merupakan pilar penting yang mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
15	Sarius, D. P., et al. (2025)	Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis	Terdapat pengaruh variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Akuntansi Sektor Publik dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas

Akuntansi sektor publik merupakan sistem yang digunakan pemerintah untuk mencatat, mengukur, mengklasifikasikan, dan melaporkan seluruh aktivitas keuangan yang bersumber dari dana publik. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, akuntansi sektor publik berfungsi sebagai alat utama untuk menjamin bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Melalui laporan keuangan yang disusun secara sistematis, pemerintah menunjukkan kinerja keuangannya sekaligus membuka ruang bagi publik untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran (Hendriarto et al., 2025; Rupilu & Loupatty, 2024).

Dalam era reformasi administrasi publik, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat. Masyarakat tidak hanya menuntut hasil pembangunan, tetapi juga ingin

mengetahui bagaimana proses pengelolaan keuangan dilakukan. Di sinilah akuntansi sektor publik memainkan peran strategis sebagai penyedia informasi yang objektif dan terukur mengenai kondisi keuangan pemerintah. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah memungkinkan pemangku kepentingan, termasuk DPR, BPK, dan masyarakat, untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara (Maharani et al., 2025; Cinta & Tjandrakirana, 2025).

Selain sebagai alat pelaporan, akuntansi sektor publik juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian. Dengan adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang terstandarisasi, pemerintah dapat memantau realisasi anggaran, mengidentifikasi penyimpangan, serta mengevaluasi kinerja setiap unit kerja. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi sektor publik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berperan dalam menjaga disiplin fiskal dan integritas pengelolaan keuangan negara (Saputra et al., 2025; Hendriarto et al., 2025).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dalam Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan komponen penting dalam penerapan akuntansi sektor publik di tingkat pemerintah daerah. SKAD dirancang untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan daerah, mulai dari penerimaan pajak hingga belanja pembangunan, dicatat secara akurat dan dapat ditelusuri. Dengan sistem ini, pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan secara riil dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Edowati et al., 2021; Zega et al., 2025).

Keberadaan SKAD yang terintegrasi juga meningkatkan transparansi karena data keuangan dapat diolah dan disajikan secara lebih sistematis dan tepat waktu. Ketika laporan keuangan daerah tersedia secara terbuka, masyarakat dan lembaga pengawas dapat mengevaluasi apakah penggunaan anggaran telah sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku. Hal ini memperkuat fungsi pengawasan publik sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara lebih hati-hati dan profesional (Sarius et al., 2025; Rupilu & Loupaty, 2024).

Selain itu, SKAD juga memudahkan proses audit dan evaluasi kinerja. Sistem pencatatan yang tertib memungkinkan auditor untuk menelusuri setiap transaksi secara rinci, sehingga potensi kesalahan atau penyimpangan dapat dideteksi lebih dini. Dengan demikian, SKAD tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Edowati et al., 2021; Zega et al., 2025).

Transparansi Publik sebagai Faktor Pendukung Akuntabilitas Keuangan Negara

Transparansi publik merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya akuntabilitas keuangan negara. Transparansi berarti pemerintah membuka akses terhadap informasi keuangan, mulai dari perencanaan anggaran hingga realisasi dan pelaporannya. Dengan adanya keterbukaan ini, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana publik digunakan dan sejauh mana pemerintah memenuhi tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan negara (Sabdon & Kuntadi, 2025; Maharani et al., 2025). Keterbukaan informasi keuangan juga meningkatkan kualitas pengawasan publik. Ketika laporan keuangan dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat, maka publik dapat berperan sebagai pengawas sosial yang ikut menilai kinerja pemerintah. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk bertindak lebih transparan dan bertanggung jawab, karena setiap keputusan keuangan dapat dipantau dan dievaluasi oleh masyarakat luas (Akbar et al., 2025; Zega et al.,

2025). Selain itu, transparansi juga berperan dalam mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Dengan informasi keuangan yang terbuka, peluang terjadinya manipulasi dan penyimpangan dapat diminimalkan karena setiap transaksi dapat ditelusuri. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga instrumen penting dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan negara (Sabdono & Kuntadi, 2025; Maharani et al., 2025).

Penguatan Akuntabilitas melalui Bukti Empiris

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik yang baik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pemerintah. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada publik. Penelitian Sarius et al. (2025) dan Edowati et al. (2021) membuktikan bahwa transparansi dan kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Laporan keuangan yang disusun secara andal memungkinkan pemerintah untuk menunjukkan secara terbuka bagaimana dana publik digunakan. Ketika informasi keuangan tersedia secara jelas dan terstruktur, maka pihak eksternal seperti auditor, DPRD, dan masyarakat dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Kondisi ini memperkuat akuntabilitas karena pemerintah tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara sosial kepada masyarakat (Rupilu & Loupatty, 2024; Hendriarto et al., 2025). Selain itu, akuntansi sektor publik juga berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan. Data keuangan yang berkualitas membantu pemerintah menilai apakah program dan kegiatan yang dijalankan telah memberikan manfaat yang optimal. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga dari capaian kinerja yang didukung oleh informasi akuntansi yang akurat (Saputra et al., 2025; Cinta & Tjandrakirana, 2025).

Akuntansi Sektor Publik dalam Mendukung *Good governance*

Akuntansi sektor publik memiliki keterkaitan yang erat dengan penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara. *Good governance* menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap proses pengelolaan sumber daya publik. Sistem akuntansi yang andal menjadi fondasi utama untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut karena menyediakan informasi yang dapat dipercaya dan relevan bagi para pemangku kepentingan (Kewo & Tanor, 2020; Yuanita, 2021).

Melalui laporan keuangan yang transparan, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya terhadap keterbukaan dan kejujuran dalam pengelolaan anggaran. Informasi yang disajikan tidak hanya digunakan untuk kepentingan internal, tetapi juga sebagai sarana komunikasi dengan publik. Hal ini memperkuat legitimasi pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik (Hendriarto et al., 2025; Maharani et al., 2025). Selain itu, akuntansi sektor publik juga berperan dalam memperkuat sistem pengendalian internal. Dengan adanya pencatatan dan pelaporan yang terstruktur, potensi penyimpangan dan kecurangan dapat dideteksi lebih dini. Penelitian Matondang dan Silaban (2025) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang kuat, yang didukung oleh sistem akuntansi yang baik, mampu menekan risiko fraud dalam sektor

publik. Dengan demikian, akuntansi sektor publik tidak hanya mendukung transparansi, tetapi juga menjaga integritas dan kredibilitas pemerintahan.

Implikasi Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Penerapan akuntansi sektor publik yang konsisten memberikan implikasi luas terhadap kualitas tata kelola keuangan negara. Sistem akuntansi yang terstandarisasi memungkinkan pemerintah menyusun laporan keuangan yang dapat dibandingkan antarperiode dan antarentitas, sehingga memudahkan proses evaluasi kinerja dan pengawasan (Cinta & Tjandrakirana, 2025; Rupilu & Loupatty, 2024). Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam sistem akuntansi pemerintah semakin memperkuat transparansi. Digitalisasi pencatatan dan pelaporan memungkinkan informasi keuangan disajikan secara lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh publik. Hal ini meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan sekaligus memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah (Hendriarto et al., 2025; Saputra et al., 2025).

Implikasi lainnya adalah meningkatnya kualitas audit dan pengawasan. Data keuangan yang lengkap dan terintegrasi memudahkan auditor dalam menelusuri transaksi dan menilai kepatuhan serta kinerja pemerintah. Dengan demikian, penerapan akuntansi sektor publik tidak hanya berdampak pada kualitas laporan keuangan, tetapi juga pada penguatan sistem pengendalian dan akuntabilitas keuangan negara secara keseluruhan (Maharani et al., 2025; Akbar et al., 2025).

Tantangan Penerapan Akuntansi Sektor Publik dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas

Meskipun akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan standar akuntansi pemerintahan secara optimal. Aparatur yang belum memiliki pemahaman yang memadai cenderung menghasilkan laporan keuangan yang kurang akurat dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya (Aprilia & Ramadhan, 2025; Rupilu & Loupatty, 2024). Selain aspek sumber daya manusia, kompleksitas sistem akuntansi berbasis akrual juga menjadi tantangan tersendiri. Perubahan dari sistem berbasis kas menuju sistem akrual menuntut penyesuaian prosedur, teknologi, dan budaya kerja di lingkungan birokrasi. Tanpa kesiapan sistem informasi dan infrastruktur teknologi yang memadai, penerapan sistem akuntansi yang canggih justru dapat menimbulkan kesalahan pencatatan dan keterlambatan pelaporan (Hendriarto et al., 2025; Saputra et al., 2025).

Tantangan lainnya adalah masih lemahnya sistem pengendalian internal di beberapa instansi pemerintah. Sistem pengendalian yang tidak berjalan efektif membuka peluang terjadinya penyimpangan, manipulasi data, dan praktik kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara. Penelitian Matondang dan Silaban (2025) menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian internal berkorelasi dengan meningkatnya risiko fraud dalam sektor publik. Selain itu, tingkat transparansi yang belum merata juga menjadi hambatan dalam mewujudkan akuntabilitas yang kuat. Di beberapa daerah, informasi keuangan masih belum disajikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini membatasi peran publik dalam melakukan pengawasan dan melemahkan mekanisme akuntabilitas sosial (Zega et al., 2025; Sabdono & Kuntadi, 2025).

Upaya dan Strategi Penguatan Akuntansi Sektor Publik

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan langkah yang sangat penting. Pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi aparatur di bidang akuntansi pemerintahan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mereka mampu memahami dan menerapkan standar akuntansi dengan benar. Aparatur yang kompeten akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan akuntabel (Aprilia & Ramadhan, 2025; Hendriarto et al., 2025). Selain itu, penguatan sistem informasi keuangan berbasis teknologi juga menjadi strategi kunci dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi. Sistem yang terintegrasi memungkinkan proses pencatatan dan pelaporan dilakukan secara real time, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dan manipulasi data. Digitalisasi sistem akuntansi juga memperluas akses publik terhadap informasi keuangan pemerintah (Saputra et al., 2025; Maharani et al., 2025).

Penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan juga perlu dilakukan agar penerapan akuntansi sektor publik berjalan secara konsisten. Aturan yang jelas mengenai pelaporan keuangan, audit, dan sanksi atas pelanggaran akan mendorong instansi pemerintah untuk mematuhi standar yang berlaku dan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan (Cinta & Tjandrakirana, 2025; Yuanita, 2021).

E. PENUTUP

Berdasarkan kajian literatur dari berbagai penelitian tahun 2020–2025, dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Sistem akuntansi pemerintah memungkinkan pengelolaan dana publik dilakukan secara lebih terbuka, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Hendriarto et al., 2025; Cinta & Tjandrakirana, 2025). Penerapan sistem akuntansi yang berkualitas, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, terbukti meningkatkan keandalan laporan keuangan dan memperkuat mekanisme pengawasan. Transparansi laporan keuangan memungkinkan publik dan lembaga audit menilai kinerja pemerintah secara lebih objektif, sehingga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Sarius et al., 2025; Yuanita, 2021).

Keberadaan sistem akuntansi yang terintegrasi, seperti SAKD, juga berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini memungkinkan setiap transaksi keuangan tercatat secara sistematis dan dapat ditelusuri, sehingga memperkecil peluang terjadinya penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Edowati et al., 2021; Zega et al., 2025). Namun demikian, keberhasilan penerapan akuntansi sektor publik sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, sistem informasi yang digunakan, serta kekuatan pengendalian internal. Tanpa dukungan ketiga aspek tersebut, sistem akuntansi yang baik tidak akan mampu menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, serta konsistensi penerapan standar akuntansi pemerintah perlu terus dilakukan agar akuntansi sektor publik benar-benar menjadi fondasi bagi pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel (Aprilia & Ramadhan, 2025; Matondang & Silaban, 2025; Saputra et al., 2025).

F. DAFTAR PUSTAKA

- Ana, A. T. R., & Ga, L. L. (2021). Analisis akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan Bumdes (Studi kasus BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*. <https://ejurnal.undana.ac.id/JAK/article/view/3991>
- Aprilia, G. D., & Ramadhan, P. R. (2025). Implementasi akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. *Jurnal Rumpun Ekonomi*. <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/view/4297>
- Cinta, D. C. S., & Tjandrakirana, R. (2025). Akuntansi pemerintahan terhadap administrasi keuangan negara dalam mencapai kinerja dan akuntabilitas publik yang lebih baik. *Musytari: Jurnal Manajemen*. <https://cibangsa.com/index.php/musytari/article/view/355>
- Edowati, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai. *Indonesian Journal of Business and Management*. <https://journal.unibos.ac.id/jbm/article/view/1184>
- Hendriarto, P., Sangapan, L. H., dkk. (2025). Akuntansi sektor publik di Indonesia: Kajian sistematis atas transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah. *Jurnal Greenation*. <https://greenationpublisher.org/JGIA/article/view/467>
- Kewo, C. L., & Tanor, L. A. O. (2020). Apakah good government governance dan pengendalian intern dapat mempengaruhi kualitas akuntabilitas laporan keuangan sektor publik? *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*. <https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/2144>
- Khairan, U., Ikhyannuddin, I., & Murhaban, M. (2023). Dampak penerapan akuntansi sektor publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap pencegahan fraud (Studi kasus Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jam/article/view/10689>
- Maharani, A. P., Putri, F. R., Karina, K., & Safitri, R. W. (2025). Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. *Musytari: Jurnal Manajemen*. <https://cibangsa.com/index.php/musytari/article/view/3491>
- Matondang, K. A., Silaban, L. D. Y., dkk. (2025). Evaluasi efektivitas pengendalian internal dalam mencegah kecurangan akuntansi sektor publik. *Mantap: Journal of Management Accounting, Tax and Production*. <http://rayyanjournal.com/index.php/mantap/article/view/5670>
- Rajagukguk, G. P. J., Simanjuntak, L., dkk. (2025). Evolusi teori akuntansi sektor publik: Analisis perkembangan dan tantangan di era digital. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Sosial (IJESS)*. <https://ejournal.pkmpi.org/index.php/ijess/article/view/47>
- Rupilu, M., Loupatty, L. G., dkk. (2024). Akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. <http://j-economics.my.id/index.php/home/article/view/272>
- Sabdono, W. A., Kuntadi, C., dkk. (2025). Katalisator integrasi pengadaan dan pembayaran untuk mendorong efisiensi dan transparansi tata kelola keuangan negara. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*. <https://jurnalbppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk/article/view/924>

- Saputra, Y. M., Menne, F., & Amri, N. F. (2025). Analisa perlakuan akuntansi sektor publik pada pemerintah daerah Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat. *ACCESS: Journal of Economy and Business*. <https://journal.unibos.ac.id/access/article/view/2544>
- Sarius, D. P., Wardi, J., & Pahlawan, R. (2025). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. *AKUNTANOGRAFI: Journal of Accounting and Finance*. <https://journal.idede.org/index.php/AKUNTANOGRAFI/article/view/180>
- Siahay, A. Z. D. (2023). Akuntansi publik dan fiscal sustainability: Kajian literatur sistematis tentang peran transparansi informasi dalam tata kelola fiskal. *Economics and Digital Business Review*. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/2680>
- Wahidin, D., & Susilawati, E. (2020). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sekolah. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan*. <https://aktiva.nusaputra.ac.id/article/view/45>
- Windy, W., & Subardjo, A. (2023). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5055>
- Yuanita, D. W. (2021). Analisis perwujudan *good governance* melalui akuntabilitas publik dan meminimalkan perilaku oportunistik di dalam lingkungan pemerintahan daerah. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/salam/article/view/8611>
- Zega, R., Telaumbanua, A., Bate'e, M. M., dkk. (2025). Analisis transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nias Utara. *Economics and Digital Business Review*. <http://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/2997>